



---

**ANALISIS PERAN AKTOR DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PROGRAM  
SEKARDADU (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi)**

**Dian Roshanti**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi  
Korespondensi penulis: [dian.roshanti.humas@gmail.com](mailto:dian.roshanti.humas@gmail.com)

**Roudlotun Nurul Laili**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi

**Badrul Munif**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi

**Biji Bintang Habibitasari**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi

***Abstract.** Changes in land use, population growth and lack of public awareness of the preservation of the watershed environment are problems that result in disruption of water quality in watersheds. The existence of agricultural land that results in pesticide waste in the river, increasingly dense population settlements, industrial waste around the river also contributes to the pollution of river flows in Banyuwangi Regency. In the short term, watershed damage can result in hydrometeorological disasters such as floods, landslides or droughts, while in the long term it can cause social conflicts due to problems with the availability of water resources. The purpose of this study was to analyze the role of actors in the policy formulation of the SEKARDADU program (School for Watershed Care in Banyuwangi). This article uses a qualitative descriptive approach with data collection methods with interviews and literature studies. The results of this study are the actors involved in the policy formulation process are divided into 2 elements, namely Inside Government consisting of 10 government agencies with a role to coordinate and 12 government agencies as implementers. Meanwhile, Outside Government consists of 9 universities that assist in policy formulation activities. Policy making has given the impression that the role of the elite is more dominant so that private and elite participation is less visible.*

**Keywords:** Actor Role Analysis, Policy Formulation, SEKARDADU

**Abstrak.** Perubahan tata guna lahan, penambahan jumlah penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan DAS, menjadi masalah yang mengakibatkan terganggunya kualitas air di Daerah Aliran Sungai. Masih adanya lahan pertanian yang mengakibatkan limbah pestisida pada aliran sungai, pemukiman penduduk yang kian padat, limbah industri disekitar aliran sungai juga turut menyumbang pencemaran aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Dalam jangka pendek kerusakan DAS dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor atau kekeringan, sedangkan dalam jangka panjang bisa menimbulkan konflik sosial akibat masalah ketersediaan sumberdaya air. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran



aktor dalam formulasi kebijakan program SEKARDADU (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi). Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah adanya aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan tersebut dibagi menjadi 2 unsur yaitu *Inside Government* terdiri dari 10 instansi pemerintahan dengan peran untuk berkoordinasi dan 12 instansi pemerintahan sebagai pelaksana. Sedangkan *Outside Government* terdiri dari 9 pihak Perguruan Tinggi yang membantu dalam kegiatan formulasi kebijakan. Pembuatan kebijakan telah memberikan kesan bahwa peran elit lebih dominan sehingga partisipasi swasta dan *elite* kurang terlihat.

**Kata kunci:** Analisis Peran Aktor, Formulasi Kebijakan, SEKARDADU

## **LATAR BELAKANG**

Kabupaten Banyuwangi yang terletak di ujung timur pulau Jawa memiliki luas daratan 5 782,5 km persegi sehingga menjadikan Banyuwangi sebuah Kabupaten terluas di Jawa Timur. (Banyuwangi, 2021) Banyuwangi di kelilingi oleh Hutan, pegunungan, laut di sebelah timur dan juga di aliri 35 Daerah Aliran Sungai. (Banyuwangi, 2021) Sebagai sumberdaya alam, air sangat bermanfaat untuk kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Air yang tersedia di bumi ini tidak akan habis. Namun, permasalahan lain dapat terjadi ketika adanya pencemaran air yang mengakibatkan kebutuhan manusia akan air bersih gagal.

Perairan sungai di Kabupaten Banyuwangi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas, antara lain aktivitas perikanan, aktivitas industri, domestik, pertanian dan juga wisata. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya kualitas air sehingga munculnya pencemaran DAS (Daerah Aliran Sungai) di Kabupaten Banyuwangi. Perubahan tata guna lahan, penambahan jumlah penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan DAS, juga menjadi masalah yang mengakibatkan terganggunya kualitas air di Daerah Aliran Sungai. Masih adanya lahan pertanian yang mengakibatkan limbah pestisida pada aliran sungai, pemukiman penduduk yang kian padat dan juga limbah industri disekitar aliran sungai turut menyumbang pencemaran aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Dalam jangka pendek kerusakan DAS dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor atau kekeringan, sedangkan dalam jangka panjang bisa menimbulkan konflik sosial akibat masalah ketersediaan sumberdaya air. Bencana akan merubah pola-pola kehidupan

normal, merugikan manusia, merusak struktur sosial, mengakibatkan lonjakan kebutuhan, serta memberikan dampak buruk yang berkepanjangan. (Giri Putra et al., 2021)

Untuk menjaga kualitas air pada DAS dan juga meningkatkan fungsi aliran sungai dengan tepat guna maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama lintas sektoral termasuk Perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah melaksanakan program Sekardadu. Program Sekardadu atau Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi merupakan sebuah program lintas sektor yang diprakarsai oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Banyuwangi berkolaborasi dengan Dinas terkait lainnya antara lain Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta melibatkan Perguruan Tinggi dan Sekolah-Sekolah di Banyuwangi yang kawasannya dialiri sungai.

Program Sekardadu ini menjadi salah satu pilar yang ada didalam Program Banyuwangi *Rebound* yaitu Merajut Harmoni. Beberapa kegiatan dalam pilar merajut harmoni ini adalah a) pemberdayaan HIPPA dengan peningkatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat, b) peningkatan kapasitas pengurus HIPPAM untuk pelayanan air bersih masyarakat, c) pematangan inovasi antara lain Tandonisasi untuk menjaga ketersediaan air berbasis edu wisata konservasi, dan menginisiasi program Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi yaitu pelibatan sekolah sebagai *Agent of change* ikut serta dalam merawat DAS tetap bersih dan indah. Adapun salah satu tujuan diselenggarakannya program ini adalah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan sepanjang aliran sungai di Banyuwangi. Kesehatan lingkungan membahas hubungan antara kelompok masyarakat dan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat (Sumantri A., 2010).



Program Sekardadu ini di sahkan oleh Salinan Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/33/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi (SEKARDADU). (Keputusan Bupati Banyuwangi, 2022) Program ini di Ketuai Oleh Kepala Dinas PU Pengairan dengan wakilnya yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun tujuan dari pemeliharaan Daerah Aliran sungai adalah Untuk mengendalikan daya rusak air, sehingga perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan secara berkelanjutan pada masyarakat sekitarnya selain kegiatan fisik diperlukan pula langkah-langkah pengolahan dalam bentuk kegiatan non fisik melalui tindakan konservasi, yaitu upaya menjaga keberlangsungan aliran sungai dan kondisi sifat dan fungsi sungai agar selalu tersedia kuantitas dan kualitas yang memadai bagi aliran tersebut. kebutuhan makhluk hidup sekarang dan yang akan datang. (Giri Putra et al., 2021)

Terselenggaranya Program ini bertujuan untuk memberdayakan sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi di sekitar kawasan DAS agar dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar DAS serta memberikan edukasi masyarakat sehingga sungai menjadi bersih. Informasi tentang pemeliharaan ekosistem sungai diberikan kepada siswa dan siswi agar mereka juga memahami masyarakat untuk bersama-sama membuang sampah, khususnya sampah plastik, untuk menjaga aliran sungai yang bersih. Selain itu agar masyarakat dapat memanfaatkan aliran sungai dengan bijaksana dan justru dapat memberikan nilai wisata juga seperti memanfaatkan aliran sungai untuk budidaya perikanan dan kolam sehingga bisa di nikmati dari segi pariwisata.

Perguruan Tinggi dalam Hal ini memiliki peran untuk mengimplementasikan, menjalankan, mendampingi serta memonitor sekolah-sekolah dalam kegiatan Rawat Aliran Sungai ini. Program ini memanfaatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di masing-masing kampus, yaitu Pendidikan dengan memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat sekitar aliran sungai untuk menjaga kebersihan serta memanfaatkann aliran sungai secara positif, implementasi program ini juga bisa dijadikan bahan penelitian serta melaksanakan berbagai macam program dalam ranga mengaplikasikan Pengabdian Kepada masyarakat.

Peran aktor dalam perumusan kebijakan Tim Koordinasi Sekardadu sangatlah penting untuk dikaji lebih lanjut. Salah satu bagian terpenting untuk memastikan pengelolaan daerah aliran sungai mampu berjalan sesuai arah dan tujuan yang diinginkan adalah komponen yang sesuai dengan seperangkat aturan. (Sulistyaningsih et al., 2021) Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai operator, Anda harus bisa berkoordinasi secara bijak dengan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator bagi aktor-aktor lain, seperti swasta dan masyarakat, mensinergikan kepentingan dominan mereka dalam pembuatan kebijakan.. Dengan ini diharapkan kedepan telah terdapat payung hukum perihal program Sekardadu ini. Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Tim Koordinasi Sekardadu di Banyuwangi”**.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Formulasi Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan publik. Formulasi kebijakan adalah kegiatan di mana rencana dan metode dikembangkan untuk memecahkan masalah publik yang disepakati dalam agenda pemerintah dan diakhiri dengan pemilihan beberapa alternatif yang dianggap tepat (pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah sosial tersebut).. (LAN- Negara, 2010) Sedangkan menurut James Anderson, formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan dan berpartisipasi aktif dalam alternatif atau pilihan untuk memecahkan masalah publik (Subarsono, 2013). Widodo juga menambahkan bahwa terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui dalam proses formulasi kebijakan, yaitu : 1) problem identification (identifikasi masalah) 2) agenda setting (penyusunan agenda) 3) policy problem formulation (formulasi masalah kebijakan) dan 4) policy design (mendesai kebijakan publik). (Widodo, 2007)



## **2. Aktor dalam Formulasi Kebijakan Publik**

Siapakah aktor dalam formulasi kebijakan, mereka adalah orang dan kelompok yang terlibat dalam dan memiliki pengaruh atas proses kebijakan publik. Membahas tentang aktor dalam formulasi kebijakan memiliki arti yang sangat penting. Di negara maju atau berkembang, aktor menentukan isi politik dan mewarnai dinamika tahapan proses politik. Ketika menganalisis proses politik, para ilmuwan politik juga memberikan perhatian khusus pada aktor. Lindblom percaya bahwa pembuat kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Biasa,
- b. Pemimpin organisasi
- c. Anggota DPR
- d. Pemimpin Lembaga Legislative
- e. Aktifis partai
- f. Pemimpin Partai
- g. Hakim
- h. Pegawai negeri sipil
- i. Teknisi dan pelaku industri. (Lindblom, 1986)

## **3. Peran**

Teori peran menurut Biddle dan Thomas di bagi dalam empat golongan, yaitu :

- a. Beberapa orang yang mengambil bagian dalam sebuah proses interaksi sosial.
- b. Adanya perilaku dalam proses interaksi sosial itu
- c. Keberadaan beberapa orang dalam perilaku yang dimaksud.
- d. Hubungan antara individu dengan perilaku (Sarwono, 2007)

Peran adalah interaksi sosial yang terjadi di masyarakat yang menggambarkan harapan-harapan yang memandu perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Para aktor ini kemudian dituntut untuk melakukan peran sesuai dengan perannya didalam kebijakan publik.

#### 4. Teknik Pemetaan *Stakeholder*

Pemetaan *Stakeholder* merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam pemerintahan yang demokratis. Freeman memberikan pemahaman bahwa *Stakeholder* adalah pihak yang dipengaruhi oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan. (Freeman R., 1984) Dalam konteks kebijakan publik, *Stakeholder* juga dapat dipahami sebagai pihak yang dapat terpengaruh dan/atau mempengaruhi dalam sebuah keputusan.

#### 5. Teori *Elite* Dalam Formulasi Kebijakan

Pada proses formulasi kebijakan peran aktor *elite* dapat dirumuskan mejadi teori *elite-massa*. Teori *elite* dikembangkan atas dasar dan asumsi bahwa dalam kelompok masyarakat selalu terdapat dua kelompok yaitu kelompok *elite* sebagai pemegang kekuasaan dan kelompok *massa* yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam teori ini digambarkan bahwa peran aktor dalam formulasi kebijakan selalu terdapat dualisme meskipun diterapkan secara demokratis. Lebih lanjut di sebutkan bahwa kelompok *elite* adalah kelompok yang menguasai modal sosial yang ada dalam masyarakat dan *massa* adalah kelompok yang dikuasai. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak lebih hanyalah referensi politik dari para *elite*.

Gaetano mosca dalam karyanya *The Rulling Class* juga menyebutkan bahwa terdapat dua kelompok besar yaitu kelas yang memerintah (pemerintah), yang terdiri atas sedikit orang, kelompok ini melaksanakan fungsi politik, menguasai kekuasaan, dan menikmatinya. yang Kedua, kelas yang diperintah, jumlahnya banyak, dan berkecenderungan dimobilisasi oleh penguasa dengan cara-cara yang berdasarkan hukum dan paksaan.

Menurut Lidblom (1980) secara umum aktor-aktor atau yang terlibat dalam proses kebijakan publik dibagi dalam dua kategori besar, yaitu aktor *inside government* dan aktor *outside government*. (Suaib, 2016)



### 1. Aktor *Inside Government*

Dalam konteks Indonesia (yang berbeda dengan negara lain), aktor-aktor dalam pemerintahan adalah:

- a. kepala eksekutif (presiden: dewan presiden: menteri, pemimpin daerah), yang biasanya merupakan jabatan politik;
- b. anggota dewan perwakilan nasional (undang-undang/DPR dan MPR);
- c. dari pihak yudikatif dan individu;
- d. birokrasi mulai dari sekretariat daerah, kepala kantor daerah sampai ke tingkat paling bawah (misal: petugas trantip sebagai level bureaucrat), yang menjamin ketertiban daerah di daerah).

### 2. Aktor *Outside Government*

- a. Kelompok kepentingan, yang dapat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM), mis. kelompok/perkumpulan profesi, kelompok usaha, serikat pekerja, organisasi atau lembaga keagamaan.
- b. akademisi, peneliti dan konsultan, perorangan (perusahaan yang memberikan jasa atas nama negara). Opini publik.
- c. politisi
- d. Kelompok sasaran kebijakan (beneficiaries).
- e. Media massa.
- f. Lembaga-lembaga penyumbang dana (di antaranya Bank Dunia, IMF, yang di Indonesia cukup berpengaruh dalam menentukan kebijakan dan implementasinya).

## 1. Teori Jaringan

Istilah "jaringan" (*network*) muncul sejak abad ke 19, yang mengandung pengertian meliputi atau menutupi dengan jaringan atau dengan sepotong jaring (Parsons, 2011) Burt menyatakan bahwa "saat ini ada semacam toleransi dari berbagai pendekatan yang dapat digolongkan sebagai analisis jaringan". Sebuah keunikan dari teori jaringan adalah terpusatnya perhatian pada struktur mikro hingga makro. Bagi teori jaringan, yang dimaksud aktor dalam hal ini adalah

individu, kelompok, atau perusahaan dan masyarakat. Artinya ialah sebuah hubungan yang dapat terjadi di tingkat struktur sosial terkecil hingga terluas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif eksploratif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Penulis menelaah literatur terkait, termasuk buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang diperoleh secara online dan dapat dipertanggung jawabkan. Informasi lain yang mendukung dapat diperoleh melalui wawancara dengan pemimpin program, staf pelaksana, sasaran yang memanfaatkan program dan pengguna yang memanfaatkan dampak program.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Identifikasi Aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan Tim Koordinasi Program Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai)**

Aktor atau pelaku yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan merupakan aktor atau organisasi yang terlibat dalam interaksi antara dua aktor besar yang diharapkan mampu memberikan dukungan dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Adapapun dua aktor besar tersebut antara lain:

#### **a. Aktor *Inside Government***

Pemerintah dapat dijabarkan sebagai sebuah Perangkat negara yang terutama terdiri dari cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif atau perangkat negara lainnya yang bertindak untuk dan atas nama negara. (Astomo, 2014) lebih jelas disampaikan oleh (Fauzi & Dewi Rostyaningsih, 2018) bahwa pengertian pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk membuat dan menjalankan aturan diwilayah tertentu.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai perwujudan aktor *Inside Government* dalam perumusan kebijakan Tim Koordinasi program Sekardadu. Hal ini dapat dilihat dari telah ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/33/KEP/429.011/2022 tentang Tim Koordinasi Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi



(SEKARDADU) . Berdasarkan keputusan Bupati tersebut. Tim koordinasi program Sekardadu (sekolah rawat daerah aliran sungai) terdiri dari 10 unsur pemerintahan. Jumlah tersebut terdiri dari Bupati Banyuwangi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Banyuwangi serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### **b. Aktor Outside Government**

Yang termasuk dalam aktor Outside Government dalam formulasi kebijakan antara lain kelompok akademisi yang terdiri dari 9 Perguruan Tinggi yaitu Institute Agama Islam Darussalam (IAIDA), IAI Ibrahimy, Politeknik Negeri Banyuwangi, Universitas Bakti Indonesia, UNTAG Banyuwangi, Akademi Kelautan Banyuwangi, Universitas PGRI Banyuwangi, STIKES Banyuwangi dan Akes Rustida.

### **2. Menganalisis Peran yang dilakukan oleh Aktor Kebijakan**

#### **A. Menganalisis perilaku yang muncul dalam interaksi Perumusan Kebijakan Program SEKARDADU**

Interaksi yang terjalin antar lembaga pemerintahan yang terlibat dalam kegiatan formulasi kebijakan ini antara lain perintah dan koordinasi. Jika ditelaah dalam melihat struktur tim koordinasi dan tim pelaksana program SEKARDADU ini perintah dan tim koordinasi merupakan hal yang wajar terjadi karena adanya bentuk hierarkis dalam struktur tim tersebut. Sedangkan bentuk perilaku yang muncul dalam proses interaksi yang terjalin antara pemerintah (Inside Government) dengan Outside Government adalah kerjasama.

## B. Mengklasifikasikan kedudukan tiap aktor kebijakan

Kedudukan aktor dalam proses perumusan kebijakan bisa diartikan sebagai jabatan yang sedang dijalankan oleh aktor tersebut. Hal ini seringkali ditentukan oleh seberapa besar pengaruhnya dalam keterlibatan unsur lain dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kedudukan sebagai aktor utama dalam perumusan Kebijakan Program SEKARDADU memiliki kewenangan untuk menentukan pihak mana saja yang bisa diajak untuk bekerjasama.

## C. Mengklasifikasikan kekuatan dan ketertarikan aktor dalam proses kebijakan.

Tingkat kekuatan dan ketertarikan aktor dalam kebijakan program SEKARDADU dibagi kedalam empat kuadran, yaitu:

- a. Object yaitu *stakeholder* yang memiliki ketertarikan yang besar namun dengan *power* yang kecil terhadap perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan suatu wilayah.

Pada kuadran Object ini aktor yang menempati kuadran tersebut adalah 9 Perguruan Tinggi, 267 Lembaga Pendidikan/ sekolah dan juga Media Massa yaitu Radar Banyuwangi.

- b. Player adalah aktor yang memiliki kekuatan dan ketertarikan secara signifikan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai penanggung jawab dalam struktur tim koordinasi program SEKARDADU ini memiliki tugas yaitu sebagai penanggung jawab dalam kegiatan program SEKARDADU. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Pengairan Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat interest dan power tertinggi sehingga dapat golongan sebagai Palyer dalam Perumusan Kebijakan program SEKARDADU. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki power tinggi tertingi bila dibandingkan unsur aktor lainnya dalam unsur **Struktur jaringan dalam tim koordinasi dan tim pelaksana dalam formulasi kebijakan program SEKARDADU.**



Dalam proses perumusan kebijakan program SEKARDADU terdapat beberapa instansi dalam struktur tim koordinasi dan tim pelaksananya. Sinergitas dari instansi-instansi pemerintah disini tentunya mengandung maksud agar dapat berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama. Hal ini dikarenakan masing-masing instansi memiliki sumberdaya yang berbeda-beda sehingga dapat tercipta saling ketergantungan dari masing-masing instansi tersebut. Agar mampu mengakomodir nilai kepentingan yang ada di masing-masing instansi perlu adanya keterlibatan aktor diluar instansi pemerintahan juga. Untuk itu diperlukanlah jaringan untuk menghubungkan dan bekerjasama. Dalam perspektif jaringan, aktor tunggal tidak lagi diperankan oleh pemerintah. Instansi pemerinthan dituntut untuk mampu membangun jaringan aktor-aktor tersebut dalam setiap perumusan kebijakan publik. (Taufik, 2017)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Aktor yang terlibat dalam formulasi Kebijakan Tim Koordinasi Program SEKARDADU**

Produk dari perumusan kebijakan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program SEKARDADU dalam hal ini adalah Surat Keputusan Bupati No. 188/33/KEP/429.011/2022 tentang penetapan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana kegiatan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi atau yang disingkat dengan SEKARDADU. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan siapa saja aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan tersebut dibagi menjadi 2 unsur yaitu **Peran yang dilakukan oleh aktor kebijakan**

Munculnya perintah dan koordinasi merupakan akibat adanya interaksi dalam proses perumusan kebijakan. Interaksi yang terjalin antara pemerintah (Inside Goverment) dan Perguruan Tinggi (outside Goverment) berlangsung secara sinergis. Bentuk interkasi tersebut yaitu terciptanya kerjasama diantara keduanya.

## 2. Tingkat kekuatan dan ketertarikan Aktor Kebijakan

Aktor yang memiliki tingkat ketertarikan yang besar namun hanya memiliki power yang kecil dalam perumusan kebijakan ini adalah Perguruan tinggi. Sedangkan aktor yang memiliki Power yang besar akan tetapi tingkat ketertarikannya rendah karena lingkup kerjanya yang luas dan menyeluruh disebuah wilayah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. **Rekomendasi**

1. Keterlibatan aktor dari pemerintah mengakibatkan kebijakan ini bersifat top-down, untuk itu dalam proses perumusan kebijakan juga perlu untuk dilibatkan masyarakat agar pemerintah bisa lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat menampung permasalahan sosial yang timbul di daerah sekitar aliran sungai sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih menyeluruh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih tuntas.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu lebih dibuat terjadwal sehingga masing-masing aktor yang berperan bisa melaporkan progres kegiatannya. Sehingga kegiatan SEKARDADU ini bisa terimplementasi dengan baik.



## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN RUNNING GOVERNANCE. *Kanun Jurnal Hukum, XVI*(64), 401–420.

Fauzi, A. N., & Dewi Rostyaningsih. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Journal of Public Policy and Management Review, 7*(4), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22052/20296>

Sulistyaningsih, T., Nurmandi, A., Salahudin, S., Roziqin, A., Kamil, M., Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., & Loilatu, M. J. (2021). Public policy analysis on watershed governance in Indonesia. *Sustainability (Switzerland), 13*(12). <https://doi.org/10.3390/su13126615>

Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. *AL-IJTIMA 'I- International Journal of Government and Social Science, Vol. 2*(1), 37–72. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil\\_wars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)

### Artikel Prosiding

Giri Putra, I.B, Karyawan, A., IDM, Saadi, Y., L.Wirahman Wiradarma, & Salehudin. (2021). MANFAAT DAERAH ALIRAN SUNGAI BERKELANJUTAN ERA PANDEMI UNTUK MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Prosiding PEPADU Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(November), 91–94.

### Buku Teks

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.

Freeman R. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.

LAN- Negara. (2010). *Pedoman Perumusan Kebijakan*. Tim PKMP-LAN.

Lindblom, C. E. (1986). *Proses Penetapan Kebijaksanaan* (ke 2). Erlangga.

Mark, C. (1995). *Public Policy: a Critical Approach*. Prentice Hall.

Parsons, W. (2011). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*.

Kencana Prenada Media Group.

Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern* (Edisi Ketu). Kencana Prenadamedia Group.

Sarwono, S. W. (2007). *Teori-Teori Psikologi Social (2007), Cet ke -8 hlm.214 (ke 8)*. PT. Raja Grafindo Persada.

Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.

Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Utama.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sumantri A. (2010). *Kesehatan Lingkungan*. Kencana Prenada Media Group.

#### **Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

Keputusan Bupati Banyuwangi. (2022). *Tim Koordinasi Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi (SEKARDADU) Nomor 188/33/KEP/429.011/2022 (188/33/KEP/429.011/2022; Vol. 4)*.

LAN- Negara. (2010). *Pedoman Perumusan Kebijakan*. Tim PKMP-LAN.

#### **Sumber dari internet dengan nama penulis**

Banyuwangi, B. K. (2021). *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2021*. BPS Kbaupaten Banyuwangi.